

**BELANJA MODAL DITINJAU DARI DANA PERIMBANGAN DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI
BALI TAHUN 2016-2020**

Ni Putu Vira Cintya Dewi^{1*}
Tiara Kusuma Dewi¹
Gde Herry Sugiarto Asana¹

¹Universitas Triatma Mulya

*Corresponding author: viracintya0404@gmail.com

ABSTRACT

Local governments utilize their capital expenditure budgets to construct facilities and infrastructure for the development of their respective regions. The distribution of capital expenditure is influenced by various factors, including local original revenue and balancing funds. The objective of this research is to examine the impact of local original income and balancing funds on capital expenditure in the regencies and cities of Bali. The data for this study was collected through the documentation method, gathering, processing, and recording data from secondary sources relevant to the research. The study population comprises the Regency and City Governments of Bali, which consist of eight districts. The results indicate that the profit sharing fund has a positive effect on capital expenditure. It is recommended that local governments in Bali focus on further developing potential sources of regional income to enhance their Regional Original Revenue (PAD). This can be achieved through the intensification of tax collection and the formulation of regional regulations that support economic activities within the regions. The allocation of balancing funds such as General Allocation Fund (DAU), Specific Allocation Fund (DAK), and Special Allocation Fund (DBH) should prioritize areas that directly impact public interests, such as infrastructure and facilities that stimulate economic growth. It is important to avoid diverting the balancing fund and PAD for non-beneficial expenditure allocations. Capital expenditure should be carried out with the aim of providing optimal public services and generating income for the region..

Keywords: capital expenditure, local original revenue, equalization fund

I. PENDAHULUAN

Data penelitian ini mencakup realisasi anggaran belanja modal kabupaten/kota Bali dari tahun 2016 hingga 2020. Anggaran sektor publik pemerintah daerah merupakan hasil dari alokasi sumber daya yang

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah daerah, baik untuk tugas-tugas pemerintahan maupun kepentingan umum. Berikut ini adalah realisasi anggaran belanja modal kabupaten/kota Bali pada periode tersebut.

Tabel 1
Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Bali
Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2016	Rp 6.086.850.948
2017	Rp 6.512.891.332
2018	Rp 8.621.023.615
2019	Rp 10.209.969.533
2020	Rp 9.143.215.606

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2016, anggaran belanja modal sebesar Rp3.274.712 untuk kabupaten/kota di Bali mengalami fluktuasi yang signifikan hingga tahun 2020 mencapai Rp3.907.435. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 10. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik dapat meningkat. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan penerimaan lain yang sah..

Pendapatan Asli Daerah, peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya meningkatkan investasi pemerintah daerah, sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dari penerimaan lain yang sah. Berikut tabel APBD pendapatan asli daerah kabupaten/kota se-Bali tahun 2016-2020 :

Tabel 2
Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Bali
Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2016	Rp 6.086.850.948
2017	Rp 6.512.891.332
2018	Rp 8.621.023.615
2019	Rp 10.209.969.533
2020	Rp 9.143.215.606

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2022

Tabel 2 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Bali dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mampu meningkatkan belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Bali agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2014) dan Martini et al. (2014), yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Artinya, semakin tinggi pendapatan suatu daerah dalam bentuk

PAD, semakin tinggi pula alokasi belanja modal yang dialokasikan untuk daerah tersebut. Namun, penelitian ini berbeda dengan temuan yang disampaikan oleh Wandira (2013) dan Putro (2010), yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan daerah dengan belanja modal. Selain Pendapatan Asli Daerah, sumber dana lain yang digunakan untuk pengeluaran adalah dana perimbangan. Dana perimbangan ini terdiri dari dana umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus. Berikut data anggaran penerimaan dana kabupaten/kota se-Bali tahun 2016-2020.

Tabel 3
Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),
dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota se-Bali
Tahun 2016-2020

Tahun	DAU	DAK	DBH
2016	Rp 5.916.618.568	Rp 1.593.581.205	Rp 321.745.525
2017	Rp 5.973.602.100	Rp 1.794.685.770	Rp 368.660.565
2018	Rp 5.823.545.145	Rp 1.648.638.668	Rp 373.549.570
2019	Rp 6.074.180.578	Rp 1.701.803.124	Rp 373.549.570
2020	Rp 6.148.413.161	Rp 1.777.000.321	Rp 281.561.442

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2022

Tabel tersebut menggambarkan fluktuasi penerimaan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil oleh kabupaten/kota di Bali

hingga tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan pada pemerintah pusat dalam hal sumber dana. Dana Alokasi Umum

(DAU) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Pandangan mengenai DAU berbeda-beda, penelitian oleh Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, sementara Kusnandar (2012) menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Anggaran Peruntukan Spesial(DAK) dipakai buat kurangi kesenjangan layanan khalayak dampingi wilayah dengan membagikan sokongan zona semacam pembelajaran, kesehatan, prasarana, maritim serta perikanan, pertanian, dan warga lokal serta area. Ada perbandingan opini hal akibat DAK kepada berbelanja modal, di mana riset oleh Meianto et angkatan laut(AL).(2013) melaporkan kalau DAK tidak mempengaruhi kepada berbelanja modal, sedangkan Sumarmi(2009) beranggapan kalau DAK mempunyai akibat positif kepada berbelanja modal.

Anggaran Untuk Hasil(DBH) merupakan anggaran yang dialokasikan oleh APBN pada wilayah bersumber pada persentase khusus buat mendanai keinginan wilayah dalam melakukan aktivitas. DBH berasal dari pajak serta pangkal energi alam. Akibat DBH kepada berbelanja modal pula jadi perbincangan, di mana Wandira(2013) melaporkan kalau DBH mempunyai akibat positif kepada berbelanja modal, sebaliknya Jiwatami(2013) melaporkan kalau DBH tidak mempengaruhi kepada berbelanja modal. Dengan terdapatnya

perbandingan penemuan itu, periset terpicat buat menelaah balik ikatan antara berbelanja modal dengan anggaran perimbangan serta pemasukan asli wilayah di kabupaten serta Kota.

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
2. Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
3. Bagaimana Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
4. Bagaimana Dana bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan, yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976), menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen dalam suatu kontrak keagenan. Dalam hubungan ini, prinsipal mempercayakan agen untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang melibatkan delegasi keputusan. Teori keagenan ini mendasarkan pada konsep bahwa terdapat hubungan kerja antara pemberi (investor) dan penerima (pengelola) uang melalui kontrak.

Filosofi keagenan melingkupi 2 perspektif, ialah ikatan antara legislatif serta administrator dan ikatan antara legislatif serta legislatif. Dalam kondisi penguasa wilayah, perhitungan wilayah disusun dalam wujud Konsep Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Wilayah(RAPBD) yang

diajukan pada Badan Perwakilan Orang Wilayah(DPRD) buat pengecekan. Bila RAPBD itu disetujui oleh DPRD (legislatif), hingga hendak dicoba pengesahan jadi Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Wilayah(APBD). APBD dan Anggaran Belanja Legislatif digunakan sebagai alat pemantauan kinerja eksekutif.

Dengan adanya teori keagenan, hubungan antara prinsipal (pihak yang memberi) dan agen (pihak yang menerima) diatur melalui kontrak, dan terdapat kontrol dan pemantauan yang dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap keputusan dan tindakan eksekutif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan oleh prinsipal digunakan secara efektif dan efisien oleh agen dalam pelaksanaan tugasnya..

Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengartikan Belanja Modal sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembentukan modal. Belanja Modal ini bertujuan untuk menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Pengeluaran tersebut juga mencakup biaya pemeliharaan yang diperlukan untuk menjaga masa manfaat dan kualitas aset yang dimiliki.

Belanja Modal digunakan untuk memperoleh bangunan, peralatan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Aset tetap ini menjadi salah satu persyaratan penting dalam penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Tunjangan belanja modal merujuk pada pengeluaran yang memberikan manfaat melebihi satu

tahun anggaran dan berkaitan dengan aset atau kekayaan daerah.

Dalam konteks peraturan ini, Belanja Modal memiliki peran penting dalam pengembangan aset pemerintah daerah dan pelayanan publik. Standar Akuntansi Pemerintah mengatur pengelolaan dan pelaporan belanja modal agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku untuk memastikan transparansi, akurasi, dan pertanggungjawaban yang tepat terkait dengan penggunaan dana untuk pembentukan modal dan pemeliharaan aset tetap.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah merujuk pada pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setempat. Pendapatan asli daerah menjadi indikator penting untuk mengevaluasi tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Semakin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Pendapatan asli daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mengumpulkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan dan pembangunan yang sedang berlangsung di daerah tersebut.

Dalam konteks perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam memperkuat kemandirian daerah.

Dengan memiliki pendapatan asli yang cukup, daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan membiayai program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah tersebut.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan antar daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan dalam mengatasi ketimpangan antar daerah serta menyediakan sumber pendanaan bagi daerah. Berikut adalah cara penghitungan DAU sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang:

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan minimal 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 2) Dana alokasi umum untuk provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing sebesar 10% dan 90% dari alokasi umum yang disebutkan di atas.
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu kabupaten/kota ditetapkan dengan mengalikan jumlah Dana Alokasi Umum untuk kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi yang sesuai dengan kabupaten/kota tersebut
- 4) Porsi atau bobot suatu kabupaten/kota dalam perhitungan

DAU didasarkan pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

- 5) Dengan penghitungan tersebut, DAU diharapkan dapat mendistribusikan dana secara adil antar daerah dan membantu daerah yang memiliki keterbatasan pendapatan untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah mereka

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan ke daerah untuk membantu mendanai kebutuhan tertentu. DAK bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan pendanaan kepada sektor-sektor yang mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, masyarakat lokal, dan lingkungan. Dalam konteks alokasi anggaran belanja modal, DAK memiliki kecenderungan untuk digunakan dalam pembentukan aset tetap milik pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Aset tetap yang dibangun melalui penggunaan DAK dapat berupa infrastruktur, seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, puskesmas, dan sejenisnya. Melalui alokasi DAK, pemerintah dapat mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah yang membutuhkan. Dengan memperkuat infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya, diharapkan masyarakat di berbagai daerah dapat merasakan

manfaat yang lebih baik dalam hal pelayanan publik..

Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dana bagi hasil (DBH) merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah yang berasal dari pajak dan sumber daya alam. DBH dari pajak mencakup beberapa komponen, antara lain:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan bangunan.
2. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan: Merupakan penerimaan yang diperoleh dari biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan, seperti biaya pengalihan hak kepemilikan tanah atau bangunan.
3. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29: Merupakan bagian dari

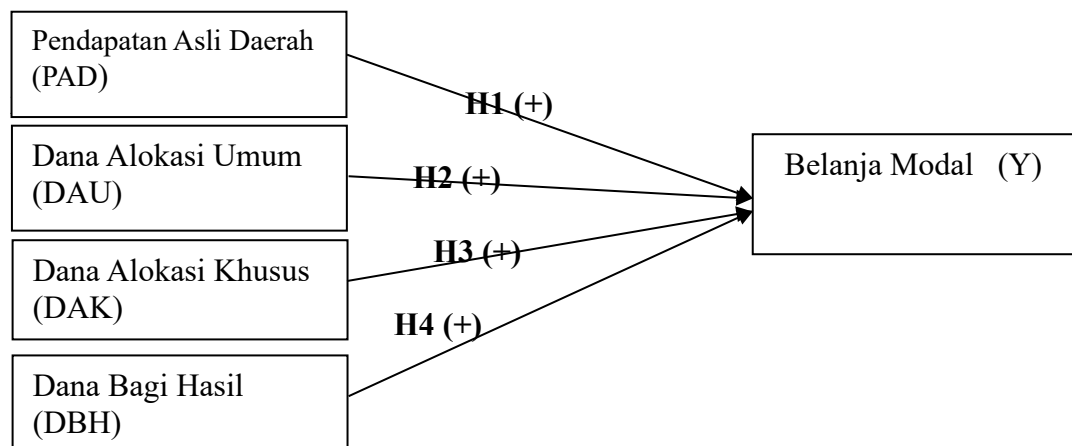
pajak penghasilan yang dipotong langsung oleh pihak ketiga, misalnya dalam bentuk pemotongan PPh oleh perusahaan pada gaji karyawan.

4. Pajak Penghasilan Pasal 21: Merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan karyawan atau pekerja yang berasal dari upah, gaji, honorarium, atau bentuk penghasilan lainnya.

Besarnya realisasi DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pendapatan yang dihasilkan dari tenaga kerja nasional serta regulasi mengenai presentase pembagian bagi daerah penghasilan tersebut. Setiap daerah penghasilan memiliki presentase yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembagian dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Berdasarkan pemaparan diatas, berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini :



Sumber : Hasil Pemikiran Peneliti, 2022

Gambar 1

Kerangka Konseptual Penelitian

a. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Dalam penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan memperhitungkan PAD yang diterima. Dengan demikian, jika pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan perlindungan sosial, pemerintah daerah harus menggali PAD sebesar-besarnya. Semakin tinggi pendapatan awal daerah, semakin besar kemungkinan daerah tersebut untuk mendukung dirinya sendiri dari pemerintah pusat. Penelitian ini didukung oleh penelitian dilakukan oleh Nurzen dan Riharjo (2016) dan Sapari (2017).

H1: PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

b. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Ini menunjukkan dengan jelas bahwa perilaku belanja modal dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan DAU. Dalam ringkasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat DAU, semakin tinggi pula alokasi belanja modal. Ketika sebuah wilayah memiliki anggaran belanja modal yang besar, anggaran tersebut akan meningkat. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto dan Handayani (2017).

H2: DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

c. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang

berhubungan dengan urusan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional, terutama dalam hal kebutuhan peralatan dan infrastruktur layanan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah DAK yang diterima, semakin tinggi pula anggaran belanja modal yang ditetapkan oleh daerah tersebut. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Oktora dan Pontoh (2013)..

H3: DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

d. Pengaruh DBH terhadap Belanja Modal

Anggaran belanja modal pemerintah daerah dapat ditentukan dalam jumlah yang lebih besar apabila anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) lebih besar, dan sebaliknya, belanja modal akan lebih rendah jika anggaran DBH lebih kecil. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Sapari (2017).

H4 : DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

III. METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:59), variabel independen adalah variabel yang memiliki pengaruh atau dampak terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Dana Alokasi Umum (DAU) (X2), Dana Bagi Hasil (DBH) (X3), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (X4). Sementara itu, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu Belanja Modal (Y).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen. Menurut Sugiyono (2017: 240), dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah terjadi, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan, diolah, dan dicatat untuk keperluan penelitian yang terkait..

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan jenis data yang terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:12), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang diangkakan atau berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Bali. Sementara itu, data kualitatif yang digunakan adalah data berupa kata, kalimat, skema, dan gambar yang terkait dengan profil dan deskripsi Bali. Data yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan data skunder, yang berasal dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dari laporan pencapaian APBD tersebut, akan diperoleh informasi mengenai besaran belanja modal, anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Teknik Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili karakteristik dan jumlahnya. Sampel dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Bali dari tahun 2016 hingga 2020. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Metode Jenuh (Census Sampling). Sampling jenuh adalah teknik di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Dalam penelitian ini, terdapat 9 sampel yang diteliti, yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya di Provinsi Bali. Jumlah total sampel yang diteliti selama periode penelitian selama 5 tahun adalah 45 sampel.

Teknik Analisis Data**Analisis Data Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memberikan gambaran umum atau deskripsi mengenai suatu data. Menurut Ghazali (2016:19), statistik deskriptif melibatkan nilai-nilai seperti rata-rata, jenis, varians, maksimum dan minimum, jumlah, rentang (range), serta perataan (standar deviasi). Dalam penelitian ini, statistik deskriptif yang digunakan meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Nilai minimum adalah nilai terendah dalam data, sedangkan nilai maksimum adalah nilai tertinggi. Rata-rata adalah nilai tengah dari data, sedangkan standar deviasi menggambarkan sejauh mana data tersebar dari rata-ratanya. Dengan menggunakan statistik deskriptif ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang

karakteristik data yang diamati dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel pengganggu dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas distribusi sering dilakukan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov, seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2016:154-158). Dalam statistik Kolmogorov-Smirnov, data dianggap terdistribusi normal jika koefisien asimptotik dari nilai signifikansi (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Artinya, jika nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari 0,05, maka dapat diterima bahwa data tersebut terdistribusi normal. Melalui uji normalitas, peneliti dapat menilai apakah asumsi normalitas terpenuhi dalam model regresi yang digunakan. Hal ini penting untuk menginterpretasikan hasil analisis regresi dengan benar..

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan linier antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung korelasi yang tinggi antara variabel independen. Metode yang umum digunakan untuk menguji multikolinearitas adalah dengan menggunakan nilai toleransi dan faktor inflasi varian (VIF), seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2016:103). Batas nilai toleransi yang umum digunakan adalah 0,10, sedangkan batas nilai VIF adalah 10.

Jika nilai VIF lebih dari 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas tinggi antara variabel independen dengan variabel independen lainnya. Melalui uji multikolinearitas, peneliti dapat mengevaluasi apakah variabel independen dalam model regresi memiliki korelasi yang tinggi, yang dapat mempengaruhi interpretasi dan keandalan hasil analisis regresi. Jika terdeteksi adanya multikolinearitas yang signifikan, langkah-langkah perbaikan atau penghapusan variabel independen tertentu dapat dilakukan untuk memperbaiki model regresi..

Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidakseragaman varian residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas atau memiliki varians residual yang homogen. Ketika suatu model regresi mengalami heteroskedastisitas, hasil prediksi model tersebut dapat menjadi tidak akurat. Metode yang umum digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah dengan meregresikan variabel bebas terhadap absolut residu, seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2016:137). Dalam uji ini, hipotesis yang diajukan adalah tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Untuk menguji heteroskedastisitas, probabilitas signifikansi (p-value) dari setiap variabel bebas dalam model regresi harus lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi

tidak mengalami heteroskedastisitas. Melalui uji heteroskedastisitas, peneliti dapat mengevaluasi apakah model regresi yang digunakan memiliki ketidakseragaman varian residual. Jika heteroskedastisitas terdeteksi, langkah-langkah perbaikan atau transformasi data tertentu dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara variabel dengan kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terdapat korelasi ini, disebut sebagai masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson, sebagaimana dijelaskan oleh Ghozali (2016:107). Uji Durbin Watson ini digunakan khusus untuk menguji autokorelasi tingkat satu. Uji ini mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak adanya variabel di antara variabel independen. Melalui uji Durbin Watson, peneliti dapat mengevaluasi apakah terdapat autokorelasi dalam model regresi yang digunakan. Hasil dari uji ini akan memberikan nilai Durbin Watson yang berkisar antara 0 dan 4. Nilai Durbin Watson sekitar 2 menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi. Nilai di bawah 2 menunjukkan adanya indikasi autokorelasi positif, sementara nilai di atas 2 menunjukkan adanya indikasi autokorelasi negatif. Jika terdeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi, langkah-langkah perbaikan seperti transformasi data atau

penggunaan metode regresi yang sesuai dengan asumsi autokorelasi dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Metode Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini, dilakukan pengujian menggunakan metode regresi linear berganda. Metode ini memungkinkan pengujian terhadap lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen dalam suatu model regresi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi populasi atau nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen yang diketahui. Relasi antara variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan menggunakan persamaan regresi linear berganda, sebagaimana dijelaskan oleh Ghozali (2016:215):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y	= Belanja Modal
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DBH	= Dana Bagi Hasil
e	= error

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Imam Ghozali (2016:97), koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai koefisien determinasi rendah, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memiliki keterbatasan

dalam menjelaskan variasi yang ada dalam variabel dependen. Dalam hal ini, informasi yang diberikan oleh variabel-variabel independen sangat terbatas atau sedikit dalam menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Namun, jika nilai koefisien determinasi mendekati 1, hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen memberikan informasi yang sangat relevan dan mampu menjelaskan sebagian besar variasi yang terdapat dalam variabel dependen. Dalam kasus ini, hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dalam variabel dependen dapat diberikan oleh salah satu atau beberapa variabel independen yang terkait. Dengan demikian, koefisien determinasi memberikan indikasi tentang sejauh mana variabel independen memberikan kontribusi dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen..

Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. Uji ini bertujuan untuk menguji kesesuaian model secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, pengujian model fit dilakukan menggunakan uji F. Jika nilai tingkat signifikansi (p-value) dari uji F lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa model regresi secara signifikan sesuai dengan data yang ada. Dalam kata lain, variabel-variabel independen

secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini mengindikasikan bahwa model regresi mungkin tidak sesuai dengan data yang ada. Dalam kasus ini, variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dengan demikian, uji statistik F memberikan informasi tentang kesesuaian model regresi dengan data yang digunakan. Hasil uji F dapat membantu peneliti dalam menentukan apakah model regresi yang digunakan secara keseluruhan cocok dengan data atau tidak..

Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh individual dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Uji ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi apakah setiap variabel independen secara signifikan mempengaruhi variasi yang terdapat dalam variabel dependen. Jika hasil uji t menunjukkan tingkat signifikansi (p-value) kurang dari 0,05, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam kata lain, variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan variasi yang terdapat dalam variabel dependen. Namun, jika nilai tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel

dependen. Dalam kasus ini, variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dengan demikian, uji statistik t memberikan informasi tentang pengaruh individual dari setiap variabel independen terhadap variabel

dependen. Hasil uji t membantu peneliti dalam menentukan apakah masing-masing variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Deskriptif

Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	45	104829402.00	6791520732.00	901643356.3000	1557686407.00000
Dana Alokasi Umum	45	330336650.00	1009082432.00	665252434.5000	176140461.40000
Dana Alokasi Khusus	45	111410691.00	320363404.00	189237979.7000	58160520.22000
Dana Bagi Hasil	45	15577018.00	102975626.00	37278418.5100	26414007.77000
Belanja Modal	45	144107607.00	1603761628.00	425258659.3000	369970857.50000
Valid N (listwise)	45				

Sumber : data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui gambaran tentang distribusi data sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai terendah 104.829.402,00 dan tertinggi 6.791.520.732,00 dengan rata-rata 901.643.356,31 dan standar deviasi 1.557.686.407,4.
- 2) Dana Alokasi Umum memiliki nilai terendah 330.336.650,00 dan tertinggi 1.009.082.432,0 dengan rata-rata 665.252.434,49 dan standar deviasi 176.140.461,39.
- 3) Dana Alokasi Khusus memiliki nilai terendah 111.410.691,00 dan tertinggi 320.363.404,00 dengan rata-rata 189.237.979,73 dan standar deviasi 58.160.520,223.
- 4) Dana Bagi Hasil memiliki nilai terendah 15.577.018,00 dan tertinggi 102.975.626,00 dengan rata-rata 37.278.418,511 dan standar deviasi 26.414.007,772.
- 5) Belanja Modal memiliki nilai terendah 144.107.607,00 dan tertinggi 1.603.761.628,0 dengan

rata-rata 425.258.659,29 dan standar deviasi 369.970.857,50.

Uji Normalitas

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.26600475
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.075
	Negative	-.091
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: data diolah, 2022

Hasil uji normalitas yang disajikan dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari nilai α 0,05 maka hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a				t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	3.816	1.715			2.225	.032		
Pendapatan Asli Daerah	.471	.038	.844	12.549	.000	.982	1.018	
Dana Alokasi Umum	.128	.062	.143	2.056	.046	.919	1.088	
Dana Alokasi Khusus	.122	.058	.148	2.124	.040	.912	1.097	
Dana Bagi Hasil	.088	.040	.148	2.170	.036	.961	1.041	

a. Dependent Variabel: Belanja Modal

Hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai tolerance variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH lebih tinggi dari 0,10 dan VIF variabel tersebut lebih rendah dari 10, hal ini berarti model yang digunakan tidak terjadi multikorelasi

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Tabel 7

Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.377	.971		.389	.699
	Pendapatan Asli Daerah	-.001	.021	-.010	-.069	.946
	Dana Alokasi Umum	.011	.035	.049	.310	.758
	Dana Alokasi Khusus	.020	.033	.098	.619	.539
	Dana Bagi Hasil	-.040	.023	-.269	-1.746	.088

a. Dependent Variabel: ABSRES

Sumber: data diolah, 2022

Hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai Sig. variabel PAD, DAU, DAK, DBH sebesar 0,946, 0,758, 0,088 lebih besar dari 0,05, ini yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap absolute residual. Oleh karena itu model ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 8

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.907 ^a	.822	.805	.27899	1.933

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus

b. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber: data diolah, 2022

Hasil uji autokorelasi dari tabel 8 di atas bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,933, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.816	1.715		2.225	.032
Pendapatan Asli Daerah	.471	.038	.844	12.549	.000
Dana Alokasi Umum	.128	.062	.143	2.056	.046
Dana Alokasi Khusus	.122	.058	.148	2.124	.040
Dana Bagi Hasil	.088	.040	.148	2.170	.036

a. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 9, persamaan regresi berganda dapat ditulis sebagai:

$$BM = 3.816 + 0,471PAD + 0,128DAU + 0,122DAK + 0,088DBH.....(1)$$

Keterangan :

- BM = Belanja Modal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- DBH = Dana Bagi Hasil

Uji Statistik F (Uji Kelayakan Model)

Tabel 10
Hasil Pengujian Goodness Of Fit

ANOVA ^a						
Model		sum of squares	df	mean square	F	Sig.
1	Regression	14.414	4	3.603	46.296	.000 ^b
	Residual	3.113	40	.078		
	Total	17.527	44			

a. Dependent Variabel: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DBH, DAU, Pendapatan Asli Daerah, DAK

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 10 diketahui nilai uji F-Test= 46, 296 dengan arti 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil secara bersama-sama mempengaruhi belanja modal.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 11
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	t
1 (Constant)	3.816	1.715		2.225 .032
Pendapatan Asli Daerah	.471	.038	.844	12.549 .000
Dana Alokasi Umum	.128	.062	.143	2.056 .046
Dana Alokasi Khusus	.122	.058	.148	2.124 .040
Dana Bagi Hasil	.088	.040	.148	2.170 .036

a. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber: data diolah, 2022

Dengan demikian, berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH secara signifikan mempengaruhi peningkatan belanja modal..

Koefesien Determinasi (R^2)

Tabel 12
Koefesien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.907 ^a	.822	.805	.27899

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus

b. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program SPSS, diperoleh nilai R sebesar 0,822 atau setara dengan 82,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa 82,2% variasi dalam belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU, dan DAK. Sementara itu, sisanya sebesar 18,8% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DAK memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi dalam belanja modal, sedangkan terdapat

faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini yang juga mempengaruhi belanja modal sebesar 18,8%..

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.
2. DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.
3. DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.

4. DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Saran

Berikut adalah saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan:

1. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Bali dapat meningkatkan upaya dalam mengembangkan sumber pendapatan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini dapat dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta mengembangkan peraturan daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Alokasi dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) harus diberikan prioritas pada sektor-sektor yang secara langsung mempengaruhi kepentingan umum seperti infrastruktur, fasilitas, dan program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran belanja modal harus diarahkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan menghasilkan pendapatan bagi daerah.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel-variabel lain yang mempengaruhi anggaran belanja modal, seperti luas wilayah dan pengeluaran untuk pemeliharaan. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi belanja modal di daerah.

3. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas atau menambah periode pengamatan yang lebih panjang. Dengan memperluas periode pengamatan, dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang pengaruh variabel-variabel independen terhadap belanja modal dalam jangka waktu yang lebih lama.
4. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan terkait belanja modal di daerah..

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Prof. Dr. H. Imam, M.Com, Akt., 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Heliyanto, Firnandi, dan Handayani. 2016. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(3): 1-17.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014):79-92*.
- Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandirian

- Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, Manado, 25-28 September 2013.
- Kusnandar, Dodik Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Martini, Ni Luh Dina Selvia, Cipta, Wayan, Suwendra, I Wayan, 2014. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng tahun 2006-2012. *E-Journal Bisma Vol.2 Tahun 2014*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Meianto, Edy., Betri., Weny, Cherrya Dhia, 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal*. Palembang.
- Nurzen, Miardi dan Ikhsan Budi Riharjo. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5(4).
- Oktora, F.E. dan W. Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal (Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Accountability*. Vol. 2 (1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Putro, Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi S1*. Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. 2004. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Santoso, Erna dan Sapari. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6 (3).
- Sumarmi, S. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Akmenipa UPY*, Vol 4.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan*

- R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Tuasikal, 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol.1 No. 2* Juli 2008 Hal. 142-155. Universitas Pattimura Ambon.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Vinesya. 2019. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Keterbacaan Laporan Tahunan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. (studi empiris pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index* Periode 2013-2018). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012). *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *AAJ*, Vol. 2 (1)